

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi adalah suatu cara atau taktik dalam meraih dan memperoleh sesuatu. Sehingga dalam wahana politik strategi merupakan sesuatu hal yang sangat urgen yang kianhari menjadi kajian menarik bagi para sarjana politik, bahkan bagi para aktivis, dan juga para politisi. Dalam memperebutkan kekuasaan serta memperoleh kemenangan dalam pertarungan di atas pentas politik tersebut hampir seluruh organisasi politik memiliki strategi yang berbeda-beda.

Sebagian besar peneliti yang mengulas kajian dalam bidang politik umumnya lebih banyak berorientasi pada bentuk penelitian tentang peberian suara (*voting*) serta strategi yang digunakan oleh masing-masing peserta dalam pentas politik untuk mencapai target yang diinginkan. Melihat Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif yang merupakan salah satu *entry point* demokratisasi. Artinya, demokratisasi bisa saja terjadi tanpa didahului oleh pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Tetapi kenyataan sebagian besar legitimasi politik pemerintahan diberbagai penjuru dunia diperoleh melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD secara langsung merupakan amanat dari konstitusi. Proses pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan umum yang memilih wakil rakyat secara langsung, tentunya nilai demokrasi tidak berorientasi pada hasil akhir perolehan suara yang diberikan oleh rakyat. Akan tetapi esensi dari

penyelenggaraan pemilihan DPRD secara langsung yang mengaktualisasikan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi rujukan keberhasilan dalam demokrasi. Pemilihan wakil rakyat dalam memperebutkan kursi kemenangan di DPRD secara langsung, menggambarkan suatu pembelajaran politik bagi kita yang mencakup tiga aspek. Tiga aspek tersebut antara lain, yakni sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal, *Kedua*, mengorganisir masyarakat ke dalam suatu aktivitas politik yang memberi peluang besar pada setiap organ untuk berpartisipasi, dan *Ketiga*, memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Sesuai sistem desentralisasi yang mengantongi tujuan otonomi daerah, maka pemilihan legislatif secara langsung memberikan pendidikan politik dan kesempatan kepada rakyat untuk bisa berpartisipasi dan menilai serta menentukan pemimpin yang baik sebagai keterwakilan suara rakyat di kursi DPRD tanpa adanya intervensi, intimidasi, dan diskriminasi hak dari siapa pun baik dari pemerintahan sebagai penguasa maupun para elit politik dalam menentukan pilihannya. Selain itu dengan adanya pemilihan legislatif DPRD pula memberikan latihan dan kesempatan bagi para elit politik dalam mengemembangkan kecakapan/kemampuannya masing-masing, dan juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang membangun serta mengaktualisasikannya dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang mengganjal kesejahteraan rakyat. Selanjutnya penyelenggaraan pemilihan legislatif (Pileg) DPRD secara langsung akan

menciptakan interaksi politik dalam masyarakat, serta melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat.

Dengan adanya pemilihan langsung tersebut yang memberikan kesempatan besar kepada seluruh masyarakat untuk menilai pemimpin yang nantinya akan menakodai pemerintahan mereka tanpa adanya intervensi, intimidasi, maupun diskriminasi dari siapapun. Maka esensi dan substansial dari pada demokrasi menjadi tanggung jawab bersama para kontestan politik ataupun para pemain politik dengan menjadikan konstitusi sebagai landasan. Maka dengan demikian para pelaku politik harus selalu memahami dan menjunjung tinggi prinsip etika dalam perpolitikan. Berbicara etika tentunya selalu berkaitan dengan kata-kata baik, buruk, jahat, benar, salah, wajib, harus, seharusnya, sebaiknya, jangan, adil dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pada demokrasi yang representasikan melalui pemilihan umum tersebut berdiri pada kebenaran mutlak sebagai pilihan rakyat yang dewasa dan sadar akan politik tanpa ada permainan kepentingan politik yang justru mecederai demokrasi itu sendiri.

Pada umumnya, para ilmuwan politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik, menurut Budiardjo (2008:405), yang meliputi: sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengaturan konflik.

Keempat fungsi di atas dapat dilihat bahwa partai politik sangat berperan penuh dalam upaya-upaya mengartikulasi kepentingan (*interest artikulation*) yang dalam hal ini menyatukan berbagai macam ide dan kemudian memberikan

pengaruh besar terhadap materi kebijakan kenegaraan. Menyangkut sebagai sarana komunikasi politik, partai politik juga berperan sebagai sarana yang mengsosialisasikan berbagai macam ide, visi dan misi, kebijakan, serta strategi yang menjadi orientasi partai politik tersebut dan juga kontribusi kader sebagai pemimpin negara.

Di samping itu, Azet dan Makmur Amir (2005:50) mengatakan bahwa partai politik juga memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan, dengan arti bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga setelah mendapatkan kekuasaan yang *legitimate* maka partai politik ini akan memiliki kesempatan untuk memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijakan yang akan diaplikasikan dalam pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan kendaraan kepentingan untuk memenuhi aspirasi warga negara dalam mewujudkan hak memilih dan dipilihnya dalam kehidupan bernegara.

Pluralisme partai politik dan kepentingan pada pentas pesta demokrasi ini sesungguhnya sebagai bentuk orientasi tujuan untuk kesatuan dan kemaslahatan serta untuk meramaikan pesta demokrasi sebagai tanda adanya atau berlangsungnya proses pemilihan umum/pemilihan legislatif.

Azet (2000:53) menjelaskan bahwa dalam proses ini setidaknya terdapat tiga tujuan pemilu di Indonesia, yaitu: *Pertama*, memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan secara damai dan tertib; *Kedua*, kemungkinan lembaga negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945; dan *Ketiga*, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Kabupaten Pohuwato merupakan Kabupaten yang terlahir dari hasil perjuangan seluruh elemen pemerintahan, masyarakat, dan pelajar yang kemudian diperoleh dengan hasil legalitasnya dalam UU No. 6 Tahun 2003. Diusianya yang

begitu muda tersebut Kabupaten Pohuwato telah menyelenggarakan tiga kali Pemilihan Legislatif (Pileg), yaitu: *Pertama*, Pemilihan Legislatif yang pertama berlangsung pada tanggal 9 April 2004 yang diramaikan oleh kontestan 24 partai politik, Partai Golkar ikut sebagai peserta pada Pemilihan Legislatif tersebut dengan berhasil meraih 9 kursi di DPRD; *Kedua*, Pemilihan Legislatif yang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 partai politik termasuk pula Partai Golkar dan tetap meraih 9 kursi di DPRD; dan *Ketiga*, Pemilihan Legislatif yang ketiga dilaksanakan tepat pada tanggal 9 April 2014 yang diramaikan oleh 12 Partai Politik dan oleh Partai Golkar tetap meraih 9 kursi.

Partai Golkar telah berusia tiga setengah dasawarsa yang didukung oleh kekuatan-kekuatan masyarakat dari seluruh lapisan. Partai Golkar memiliki pengalaman panjang dalam menyertai perjalanan bangsa baik dibidang pemeritahan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun pemilihan kepala daerah, partai yang berlambangkan pohon beringin tersebut mampu meloloskan 9 (sembilan) kadernya untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, sekaligus sebagai pemenang pemilihan umum legislatif di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2004, 2009, dan juga 2014 kemarin. (Fardiyanto, 2014:5)

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dalam strategi Partai Golkar terdapat sebuah keunikan dimana secara berturut-turut Partai Golkar mendominasi kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato. Kemenagan Partai Golkar di Kabupaten Pohuwato pada pemilihan legislatif yang terjadi secara berturut-turut

dalam setiap periode dengan kedudukan yang sama di kursi parlemen menimbulkan banyak pertanyaan yang cukup signifikan dengan fenomenal tersebut. Anomali terkait dengan bagaimanakah manajerial strategi yang diterapkan oleh Partai Golkar dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di dalam parlemen dengan posisi bertahan. Sehingga hal ini merupakan sebuah sejarah yang cukup menarik dan unik akan eksistensi Partai Golkar dalam pandangan masyarakat.

Dalam kajian strategi, meskipun terdapat beberapa strategi yang menyimpang baik berupa kampanye di mana terjadinya tindakan *money politik* (politik uang), melibatkan anak di bawah usia pada pelaksanaan kampanye dan pelanggaran etika dalam kampanye lainnya. Kemudian propaganda di mana berupa strategi propaganda hitam, propaganda kelabu, propaganda penamaan yang mengadudomba lawan politik baik dengan peserta pemilu lainnya maupun dengan masyarakat. Selain itu dalam pemasaran politik juga terdapat strategi yang menyimpang lainnya yang dilakukan dalam pemilu. Namun secara normatif Partai Golkar tentunya juga memiliki strategi yang cukup luar biasa dalam menggalang suara pemilih pada pemilihan umum DPRD pada tahun 2014 kemarin.

Inilah yang menjadi sebuah strategi di atas dengan perolehan kursi parlemen yang statis oleh Partai Golkar. Sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya terkait dengan sebuah Keunikan Strategi Pemenangan Partai Golkar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan strategi Partai Golkar tersebut. Berdasarkan masalah dan penjelasan di atas peneliti hendak tertarik untuk mengetahui dan lebih mendalami mengenai

kemenangan dan keunikan dalam penerapan strategi oleh Partai Golkar. Dan dengan demikian peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Uniknya Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu DPRD di Kabupaten Pohuwato Tahun 2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berupaya merumuskan masalah, yakni :

1. Bagaimanakah Keunikan Strategi Pemenangan Partai Golkar Pada Pemilu DPRD Kab. Pohuwato Tahun 2014 ?
2. Faktor-Faktor apakah yang Mempengaruhi Kemenangan Strategi Partai Golkar pada Pemilu DPRD Kab.Pohuwato Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Keunikan Strategi Pemenangan Partai Golkar dalam Pemilu DPRD Kab.Pohuwato Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Strategi Partai Golkar dalam Pemilu DPRD Kab.Pohuwato Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat besar yang mungkin dapat diambil dari hasil penelitian tersebut. Sehingga hasil

penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan, mengembangkan dan menambah pengetahuan dan sebagai bahan informasi bagi para peneliti lainnya yang hendak ingin mengkaji mengenai adanya strategi yang diterapkan oleh Partai Golkar dalam memenangkan Pemilu DPRD di Kabupaten Pohuwato Tahun 2014.
- b. Sebagai tambahan literatur dan khasanah dunia kepastakaan dalam bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya mengenai Strategi Politik Partai Golkar dalam Pemenangan Pemilu DPRD.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi Partai Golongan Karya (GOLKAR) di Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan perolehan suara Partai Golkar tersebut dalam pemilihan umum yang akan datang.
- b. Dengan hasil penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menerapkan suatu strategi politik terutama dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang.